



Jakarta, 6 Oktober 2025

Nomor : 19/01/ASIPPER/10/2025
Perihal : Pengumuman Makalah Terpilih Konferensi ASIPPER 2025
Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth.

Peserta Penulis Makalah Konferensi ASIPPER 2025
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Konferensi Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan (ASIPPER) 2025, ASIPPER dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera telah menerima sebanyak 43 abstrak. Dari jumlah tersebut, panitia memilih 32 makalah terpilih untuk mengikuti Konferensi ASIPPER 2025. Pemilihan didasarkan pada kesesuaian topik makalah dengan tema dan subtema konferensi serta adanya unsur kebaruan. Daftar Nama Peserta Penulis dan Judul Makalah Terpilih tercantum dalam lampiran surat ini.

Peserta Penulis Makalah Terpilih diharapkan dapat melakukan konfirmasi kehadiran dan mengumpulkan makalah serta dokumen presentasi paling lambat 16 Oktober 2025 melalui tautan <https://s.id/konfirm-konf-ASIPPER25>. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Sdr. Andry Mamonto **0852-2436-37454**.

Panitia mengucapkan selamat kepada para Peserta Penulis Makalah Terpilih.

Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

Ketua Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan (ASIPPER)

Lampiran

Daftar Nama Peserta Penulis dan Judul Makalah Terpilih Konferensi Nasional ASIPPER 2025

Subtema I: Perundang-undangan dan Krisis Ekonomi

No	Nama	Judul Abstrak	Institusi
1.	Dr. Basuki Kurniawan, S.H.I., M.H.	Kontroversi Legitimasi Konstitusional dan Akuntabilitas BPI Danantara Sebagai <i>Sovereign Wealth Fund</i> Indonesia Dalam Menjawab Krisis Ekonomi Global	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2.	Yudi Yasmin Wijaya, S.H. dan Evoryo Carel Prabhata, S.H., LL.M.	Kesatuan, Masyarakat, dan Demokrasi: Otonomi Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi	Universitas Airlangga dan University of Queensland
3.	Nabiela Aulia, S.H., dan Muhammad Rizki, S.H.	Respon dan Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan: Arsitektur Hukum Responsif dalam Menghadapi Krisis di Era Multikrisis	Universitas Indonesia
4.	Dr. Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum., dan Mohamad Rifan S.H., M.H.,	Desentralisasi Fiskal di Masa Krisis: Rekonstruksi Produk Legislasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Masa “Efisiensi”	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
5.	Gloria Puspa Wardhana dan Nabila Camelia Maharani	Krisis Keadilan Ekologi dan Kedaulatan Rakyat Dalam Pertambangan: Studi Kasus Kabupaten Jember	Universitas Negeri Jember

Subtema II: Perundang-undangan dan Krisis Iklim

No	Nama	Judul Abstrak	Institusi
1.	Bagus Hermanto, S.H., M.H.	Konstruksi Legislasi Hijau di Indonesia: Dimensi Hak atas Lingkungan dan Konstitusi Hijau	Fakultas Hukum Universitas Udayana
2.	Bilqis Aldila Firdausi dan Dzanur Rohmatul Hamiid	Konstruksi <i>Green Corporate Legislation System</i> dalam Penanganan Perubahan Iklim	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
3.	Denny Ferdiyantoro, S.H.	Model Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam	Kementerian Hak Asasi Manusia

		Pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim	
4.	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.	Arah Baru Pembentukan Perundang-Undangan Di Era Krisis Iklim	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5.	Musdalipa, Salma Destia Ratna Natalie, dan Ilham Dwi Rafiqi S.H., M.H.	<i>Climate Change Regulatory Assessment: Metode Penilaian Berwawasan Iklim Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Universitas Hang Tuah Surabaya
6.	Bayu Aryanto, S.H., M.H.	Konseptualisasi Peraturan Desa Berbasis <i>Environmental Justice</i> dalam Penguasaan Sumber Daya Alam Hutan	Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
7.	Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, SH., MM., MH.	Perundang – Undangan di Tengah Krisis Iklim: Strategi Hukum Menghadapi Ketidakpastian Global	Universitas Jenderal Soedirman
8.	Dr. Rifandy Ritonga, S.H., M.H.	Instrumen Peraturan Daerah dalam Menjawab Krisis Iklim: Regulasi Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Praktik di Daerah	Universitas Bandar Lampung
9.	Aditya Rizky Nugroho dan Muhammad Kevin Setio Haryanto, S. H.	Ekstraktivisme Hijau dalam Pertambangan Nikel: Eksplorasi Kritis terhadap Ratifikasi Perjanjian Perubahan Iklim	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA)
10.	Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H.	RUU Pengelolaan Perubahan Iklim: Dapatkah Memberikan Arah kebijakan yang tepat bagi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia?	Universitas Padjadjaran
11.	Muhammad Yoppy Adhi Hernawan, S.H., LL.M.	<i>Deliberative Mini-Publics</i> untuk Legislasi Lingkungan: Memperkuat Partisipasi Publik Hadapi Krisis Iklim	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
12.	Noor Tri Hastuti, SH., M.Hum.	<i>Green Legislation</i> Sebagai Instrumen Resiliensi Hukum Menghadapi Perubahan Iklim	Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
13.	Dr. Mohammad Arif dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto	<i>The Green Illusion: How Indonesia's Environmental Laws Legitimize Extractive Development</i>	Universitas Muslim Indonesia

Subtema III: Perundang-undangan, Krisis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Etika

No	Nama	Judul Abstrak	Institusi
1.	Nadia Sarah	Implikasi Krisis Ilmu Pengetahuan Terhadap Regulasi Hukum dan Etika Teknologi Konteporer	Fakulas Hukum Universitas Esa Unggul
2.	Marcelino Ceasar Kishan, S.H., M.H.	Preservasi Hierarki Kewenangan Legislasi dalam Kontradiksi Internal Pengaturan Ketentuan Peralihan	Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana
3.	Dr. Isnawati, S.H., M.H.	Dilema Etika Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah : Antara Kepentingan Publik dan Kebijakan Hukum	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
4.	Beckham Jufian Podung, SH. MH.	<i>Big Data Analytics</i> : Peluang dan Tantangan Dalam Proses Legislasi di Indonesia	Universitas Gadjah Mada
5.	Sendy Pratama Firdaus S.H., dan Ramdhan Prawira Mulya Iskandar S.H.	Era Baru Algoritma: Pelindungan Data Pribadi Untuk Pemeringkat Kredit Alternatif di Indonesia	AGPR Law Firm
6.	Dr. Eka N.A.M. Sihombing, SH, M.Hum	<i>Meaningful Participation</i> Sebagai Landasan Etik Dalam Pembentukan Undang-Undang	Fakultas Hukum UMSU Medan
7.	Muhammad Taufiq Firdaus, S.H. dan Raudatul Jannah, S.H.	Aliansi Oligark Dalam Pembentukan Undang-Undang: Praktik <i>Abusive Legislation</i> dan Pembusukan Pengetahuan	Universitas Gadjah Mada
8.	Dr. Rico Septian Noor, S.H.,M.H	Strategi Multilevel <i>Meaningfull Participation</i> Dalam Legislasi di Indonesia : Perbandingan Praktik di Beberapa Negara	Fakultas Hukum UPR
9.	Dr. Siti Hamimah.,SH.,MH	Sistem Pengawasan Terhadap Peraturan Bupati yang Ideal	Universitas Singaperbangsa Karawang
10.	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H., M.H.	<i>Anticipatory Lawmaking</i> Pengaturan Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Administrasi Negara Melalui Undang-Undang	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
11.	Dr. Mei Susanto, S.H., M.H., dkk.	Urgensi Uji Naskah Akademik: Refleksi Atas Potensi Penyalahgunaan Perbandingan Hukum Naskah Akademik RUU Ibu Kota Negara	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
12.	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., dkk.	Naskah Akademik dalam Krisis Perundang-undangan: Tanggung	Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad)

		Jawab Ilmiah dalam Pembentukan Undang-Undang	
13.	Dr. Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH	Potensi Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
14.	Dr. Andryan, SH, MH	<i>Autocracy Legalism</i> : Antara Otoritarianisme dan <i>Meaningful Participation</i> Melalui Politik Hukum Legislasi	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara